



Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi di Kelurahan Olak Kemang

Optimizing Local Governance to Enhance Accountability and Transparency in Olak Kemang Urban Village

Nela Safelia^{1*}, Scheilla Aprilia Murnidayanti², Aegisia Sukmawati³, Dahlia⁴, Afrizal⁵

^{1,3,5} Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Jambi, Indonesia

^{2,4} Program Studi D3 Perpajakan, Universitas Jambi, Indonesia

Penulis Korespondensi: nelasafelia@unja.ac.id*

Article History:

Naskah Masuk: 25 September, 2025

Revisi: 30 September, 2025

Diterima: 07 Oktober, 2025

Terbit: 10 Oktober, 2025

Keywords: Accountability;
Community service; Governance;
Local government; Transparency

Abstract: Urban villages hold crucial and strategic function in national development. Urban village is recognized as the smallest entity equivalent to a village. According to Government Regulation Number 73 of 2005 about Urban Village explains that urban village is led by "Lurah". The leader of urban village has responsibility to manage the local resources, aiming to empower local community service, welfare, and foster self-sufficiency. To accomplish these goals, it requires professional local governance. However, there are still urban villages that indicate lack of adequate capacity to implement good governance in line with established standards. This research presents a community service program conducted by lecturers at accounting department, economic and business faculty in Jambi University, focusing local governance enhancement in Olak Kemang Urban Village, Jambi City. The main activities highlighted strengthening financial management and optimized digital tools to improve quality and effective communication with local community in Olak Kemang. According to the activities conducted showed that the urban village officials in Olak Kemang should enhance ability and skill in financial management and technology utilization, particularly optimize social media use. These initiatives are expected to foster greater accountability and transparency in financial management and public service within the urban village.

Abstrak

Kelurahan memiliki peran fundamental dan strategis dalam pembangunan nasional. Kelurahan diakui secara administratif sebagai unit terkecil pemerintahan yang setingkat dengan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan (PP) 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Pemimpin kelurahan bertanggung jawab dalam mengelola potensi lokal di daerahnya, dengan tujuan utama mensejahterakan dan mencapai kemandirian masyarakat lokal. Untuk merealisasikan hal tersebut, tentunya dibutuhkan pengelolaan kelurahan secara profesional, sehingga terwujud *good governance*. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kelurahan yang masih memerlukan pembinaan dan penguatan dalam mewujudkan tata kelola yang sesuai dengan konsep *good governance*. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi melakukan pembinaan dan penguatan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan daerah kepada perangkat kelurahan di Kelurahan Olak Kemang, Kota Jambi, melalui beberapa kegiatan. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan kognisi dan keterampilan bagi perangkat kelurahan dalam pengelolaan keuangan serta optimalisasi teknologi melalui penggunaan sosial media dalam mendesiminasikan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, kelurahan diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan finansial dan pemberian layanan kepada masyarakat di Olak Kemang.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pemerintah daerah; Pengabdian masyarakat; Tata Kelola; Transparan

1. PENDAHULUAN

Kualitas pembangunan nasional tidak terlepas dari progres yang terjadi pada unit terkecil pemerintahan, yakni kelurahan yang setingkat dengan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan mengatur bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Sebuah kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya lokal secara untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pengelolaan kelurahan secara profesional sesuai konsep *good governance* (Ali & Saputra, 2020; Arifin et al., 2021; Kasenda et al., 2021). Dengan adanya tata kelola pemerintah daerah yang baik maka pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud dan membentuk partisipasi masyarakat yang positif (Handayani et al., 2023). Indikator tata kelola pemerintah daerah yang baik dapat ditinjau dari adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi, sehingga pemerintah daerah diharapkan menyampaikan informasi yang material dan relevan (Asmoro & Setianingsih, 2019; Basri et al., 2021; Salma Pratiwi & Ningsih, 2022). Adapun akuntabilitas menitikberatkan pada tanggung jawab pemerintah daerah atas perencanaan anggaran hingga realisasinya dalam kegiatan publik (Ardianti & Suartana, 2020; Safelia, 2023; Salma Pratiwi & Ningsih, 2022) dan masyarakat berkesempatan berpartisipasi dalam mensupervisi kegiatan tersebut (Setyaningrum et al., 2024).

Setiap pemerintah daerah, khususnya kelurahan telah berupaya untuk menerapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, tetapi beberapa masih memerlukan optimasi. Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola yang tidak profesional berpotensi menimbulkan maladministrasi, penurunan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Sari et al., 2020), peningkatan ekonomi masyarakat lokal (Adhinata et al., 2020; Ali & Saputra, 2020), dan peningkatan persepsi positif masyarakat kepada pemerintah daerah (Handayani et al., 2023). Sehubungan dengan hal tersebut maka pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai sarana optimasi melalui partisipasi akademisi di masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dilaksanakan di Kelurahan Olak Kemang, sebagai salah satu kelurahan yang memerlukan penguatan dan optimasi tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Kelurahan Olak Kemang berlokasi di Danau Teluk, Kota Jambi dengan luas 6.83 km² dan berada di kawasan agrikultur dan perdagangan. Kelurahan Olak Kemang mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial sebagai daerah mandiri.

Namun, observasi awal menunjukkan perlunya perbaikan pada aspek tata kelola pemerintahannya yakni masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan kelurahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Tentunya, hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas manajemen pemerintahan daerah di Kelurahan Olak Kemang. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat diperlukan dengan menitikberatkan pada optimalisasi tata kelola pemerintah daerah di Kelurahan Olak Kemang.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di kantor Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Provinsi Jambi. Subjek dalam kegiatan ini adalah para perangkat kelurahan selaku pihak yang menjalankan tata kelola pemerintah daerah, khususnya di Kelurahan Olak Kemang. Kegiatan pengabdian dilakukan dalam beberapa tahapan yakni persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan. Pertama, tahap persiapan dilakukan melalui survey awal, penyusunan rencana kerja, dan koordinasi dengan pihak kelurahan yang dilakukan pada bulan Mei 2025. Kedua, tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Agustus 2025 berupa pelaksanaan desiminasi dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, khususnya tingkat kelurahan. Ketiga, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan sebelumnya dan memastikan adanya progres yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada Oktober 2025.

Adapun pendekatan yang diterapkan yakni melalui observasi kepada perangkat kelurahan secara lebih lanjut untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam tentang pengelolaan pemerintah daerah di Kelurahan Olak Kemang. Peninjauan secara pengetahuan juga dilakukan untuk mengukur tingkat kognisi para perangkat kelurahan mengenai manajemen finansial pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi dalam penugasan di tempat kerja. Dengan demikian, diharapkan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di Kelurahan Olak Kemang dapat dicapai secara optimal.



Gambar 1 Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Tahapan persiapan berupa observasi awal dilaksanakan di pertengahan bulan Mei 2025 dan disertai penandatanganan kesediaan pemerintah Kelurahan Olak Kemang sebagai mitra kerjasama pengabdian. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan koordinasi untuk tahap pelaksanaan diseminasi dan pelatihan, yang telah dilaksanakan pada 7 Agustus 2025, yang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Olak Kemang pukul 09.00 – 12.00 WIB. Peserta yang hadir yakni dari perangkat Kelurahan Olak Kemang dan masyarakat setempat dengan jumlah 40 peserta. Desiminasi dan pembinaan dilaksanakan dengan judul “*Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi di Kelurahan Olak Kemang*”. Narasumber dalam kegiatan ini yakni tim dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Materi yang disampaikan sebagai berikut:

- (i) Tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
- (ii) Penjelasan laporan keuangan daerah mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas
- (iii) Tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti regulasi, kapasitas perangkat desa/kelurahan, dan anggaran
- (iv) Urgensi pemanfaatan teknologi sebagai media penyampaian informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien antara pemerintah kelurahan dan masyarakat



Gambar 2 Desiminasi dan Pelatihan oleh Dosen Akuntansi FEB UNJA



Gambar 3 Pegawai Kelurahan Beserta Masyarakat Antusias dalam Mengikuti Kegiatan

Berdasarkan peninjauan selama sesi desiminasi dan pembinaan diperoleh informasi bahwa belum optimalnya penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat oleh perangkat kelurahan, serta dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Hal tersebut disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, serta sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi dan manajemen keuangan pemerintahan daerah. Setelah melakukan desiminasi secara teoritis dan diskusi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan penggunaan teknologi maka dilaksanakan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 pukul 13.00 – 16.00 WIB. Tahapan tersebut mencakup tindak lanjut atas kegiatan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan akhir dan evaluasi, saat ini pemerintah kelurahan telah memiliki beberapa sosial media seperti instagram, tiktok, dan facebook sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, baik yang sifatnya finansial maupun nonfinansial.



Gambar 4 Proses Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan



Gambar 5 Apresiasi Tim Pengabdian kepada Pemerintah Kelurahan Olak Kemang

4. DISKUSI

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2025 ditemukan bahwa penggunaan teknologi informasi sebagai sarana manajemen tata kelola dan keterbukaan informasi publik masih belum optimal. Hal ini selaras dengan temuan Safelia (2023) yang menyatakan bahwa adanya keterbatasan keterampilan aparat pemerintah daerah dan minimnya optimalisasi teknologi merupakan faktor yang menghambat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana di tingkat kelurahan. Hal ini menjadi penting sebab minimnya akuntabilitas pemerintah daerah dapat menghambat partisipasi masyarakat (Kasenda et al., 2021). Selain itu, pemberdayaan sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah satu faktor krusial dalam implementasi pencatatan keuangan (Ardianti & Suartana, 2020; Arifin et al., 2021; Eka Putra et al., 2025). Masih minimnya keterampilan aparat dalam manajemen keuangan dan teknologi informasi menjadi tantangan yang diidentifikasi selama sesi pelatihan. Diseminasi dan pelatihan yang diberikan oleh tim dosen akuntansi FEB Universitas Jambi menekankan pentingnya prinsip-prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat setempat, yang selaras dalam penelitian Asmoro & Setianingsih (2019), Basri et al (2021), Salma Pratiwi & Ningsih (2022) dan Setyaningrum et al (2024). Pemahaman ini sangat urgen dalam menciptakan *good governance* di tingkat kelurahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Evaluasi lanjutan yang dilakukan pada 1 Oktober 2025 menunjukkan adanya kemajuan positif, yaitu pegawai kelurahan mulai memperhatikan tentang pengumpulan bukti-bukti atas transaksi yang dilakukan harus lengkap dan sesuai berdasarkan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah (kelurahan), serta telah dimulainya pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook oleh pemerintah kelurahan sebagai sarana komunikasi dan transparansi informasi publik. Temuan ini mengindikasikan adanya perubahan menuju tata

kelola yang lebih terbuka dan adaptif, sebagaimana yang disampaikan oleh Asmoro & Setianingsih (2019) dan Handayani et al (2023) bahwa keikutsertaan publik dan informasi yang transparan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan. Selain itu, hasil kegiatan juga mengindikasikan perlunya pendekatan berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas SDM di pemerintah daerah, seperti disarankan oleh Basri et al (2021) dan Arifin et al (2021) bahwa pembangunan di daerah yang berkelanjutan harus melibatkan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di Kelurahan Olak Kemang diperoleh informasi bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintah daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari keterbatasan keterampilan dan kognisi aparatur kelurahan. Oleh sebab itu, perlu adanya tindak lanjut sebagai solusi permasalahan tersebut. Melalui pembinaan dan pelatihan yang telah diberikan kepada pemerintah kelurahan, terdapat peningkatan positif terhadap kemampuan pengelolaan finansial di kelurahan dan penggunaan teknologi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini tentunya memberikan sinyal positif adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintah daerah di Olak Kemang. Temuan ini sejalan dengan sejumlah riset yang telah dilakukan sebelumnya bahwa kompetensi aparatur daerah, pemanfaatan teknologi, dan kecakapan manajemen keuangan daerah memiliki peran fundamental dalam mewujudkan *good governance* yang direfleksikan melalui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim peneliti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan beserta jajaran di lingkungan Universitas Jambi yakni Rektor Universitas Jambi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jambi, yang telah mendukung dan mendanai kegiatan ini berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 748/UN21.11/PM.01.01/SPK/2025. Tim peneliti juga mengapresiasi kerjasama dan atensi dari pihak pemerintahan Kelurahan Olak Kemang serta masyarakat, yang telah bersedia berproses dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan pengabdian.

DAFTAR REFERENSI

- Adhinata, B., Darma, I. K., & Siramiati, N. W. (2020). Good village governance in financial management to create independent village: Study of Pecatu Village Government. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(3). <https://doi.org/10.31940/soshum.v10i3.2015>
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 14(4), 2716–3083. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Ardianti, P. A. R., & Suartana, I. W. (2020). Kompetensi sumber daya manusia dan implementasi sistem keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2839–2855. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i11.p10>
- Arifin, S., Sari, E., & Tarigan, B. (2021). Pelatihan penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Cibubur Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 1(1), 22–30. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i1.5>
- Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana “Prodamas” dalam mewujudkan good government governance di tingkat kelurahan pemerintahan Kota Kediri. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 270–278. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>
- Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021). Implementation of good governance to improve the performance of village governments. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 123–136. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136>
- Eka Putra, W., Dahlia, D., Aprilia Murnidayanti, S., Heriyani, H., Sukmawati, A., & Nanda Utami, F. (2025). Pelatihan pencatatan keuangan dan pemahaman pajak final UMKM bagi pelaku usaha mikro. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 6(2), 404–409. <https://doi.org/10.52060/jppm.v6i2.3534>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Safelia, N. (2023). Pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(1), 74–87. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27507>
- Salma Pratiwi, P., & Ningsih, S. (2022). Implementasi akuntabilitas dan transparansi pada pelayanan publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur tahun 2020. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 5(1). <https://doi.org/10.61332/ijpa.v5i1.41>

- Sari, D. D. P., Sukanto, S., Marwa, T., & Bashir, A. (2020). The causality between economic growth, poverty, and stunting: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 13–30. <https://doi.org/10.22437/ppd.v8i1.8834>
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>
- Yuliani, R., & Firmansyah, D. (2022). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.31219/osf.io/abcd1>